

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- B. G. Tumubuan, Fred, *Pokok-pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998 dalam Penyelesaian Utang-Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- B.Ilyas dan Ricard Burton, Wirawan, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi 7, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West, 2009.
- Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Cetakan. 7, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Ed. Revisi, Cetakan. 2, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.
- Irawan, Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA-LAN Press, 1999.
- Jenderal Pajak, Direktorat, Penegakan Hukum, Modul Diklat Sistem Administrasi Modern.

- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, Tim, *Buku Ajar Ilmu Negara*, Depok: FHUI, 2001.
- P. Siahaan, Marihot, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Ed 1, Cetakan 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Memahami Keadilan di Bidang Pajak Seri Pajak Pusat*, Cetakan 5, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005.
- Ranuhandoko, I.P.M, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Cetakan 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- , *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Remy Sjahdeini, Sutan *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Garfity, 2009.
- Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Saidi, Djafar, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- , *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Slamet Surjoputro, Djoko, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Cetakan 1, Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Jakarta: UI Press, 1986.

Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Cetakan 2, Eresco, Bandung, 1987.

Suandy, *Erly Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Supramono & Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Pehitungan*, Yogyakarta: Andi, 2005.

Syahrani, Riduan *Seluk-Beluk dan Asa-Asas Hukum Perdata*, Bandung: P.T. Alumni, 2006.

Waluyoo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Cetakan 2, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Witanto, D.Y, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Esekusi)*, Bandung: CV Mandar maju, 2015.

Yani dan Gunawan, Ahmad, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Zulvina, Susi, *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak Program Diploma I Spesialisasi Pajak*, Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2011.

### **Jurnal**

Abrar, “Hak Penguasaan atas Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, (Disertasi PPs Universitas Padjajaran, Bandung, 1999).

A.R.,Topowijono, Haifa & Nengah, S, *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak*, Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 10, No. 1, 2016.

Andajani, Eniaswuri, “Tinjauan Yuridis Sita Jaminan atas Pesawat Terbang, Mesin dan Komponennya dalam hal Kepailitan Maskapai Penerbangan untuk Perlindungan Kepentingan Perusahaan *Maintenance, Repair, Overhaul* sebagai Kreditor (Studi Kasus Putusan No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST dan Putusan No 2923K/Pdt/2010/PN.JKT.PST Jo No. 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST)”, (Tesis Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014),

Budileksmana, Antariksa, *Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Untuk Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Investasi Vo 2, No 1, Januari 2001.

- Dia Utami, Erisia “Implementasi Hak Mendahulu dalam Pelunasan Utang Pajak (Pada Kasus Pailit PT XYZ)”, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2008).
- Dian Anggraeni, Tyas, *Keterpenuhan Prinsip Keadilan dalam UU Pengampunan Pajak*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 5, No 2, Agustus 2016.
- Fattah, Damanhuri, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol 9, No 2, Juli-Desember 2013.
- Fikriah & Meta W, *Analisis Pengaruh Investasi Infrastruktur Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol 2, No 1, Mei 2015.
- Hartanto, Heri, *Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit*. Jhaper, Vol 2, No 2, Juli-Desember 2016.
- Ismail, Tjip, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di tengah Globalisasi Ekonomi*. Jurnal Hukum, Vol 17, No 2, April 2010.
- Karianga, Anthonius, *Analisis Hak Konsumen Terhadap Perusahaan yang dinyatakan Pailit Oleh Hakim Pengadilan Niaga*, Artikel Tesis: Lex Adminstratum, Vol V, No 7, September 2017.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Jhon Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol 6, No. 1, April 2009
- Prasetyo, W, *Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Tindakan Penagihan dengan Tingkat Pelunasan Kewajiban Perpajakan*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Jamal, Vol 7, No 3, Desember 2016.
- Rahim, H.A., Topowijono & Sudjana, N, *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*, Jurnal Perpajakan, Vol 10, No 1, 2016.
- Rahman, I.N., Triningsih, A., W.Alia.H & Kurniawan, N. 2011. Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Rahayu, “Pengangkutan Orang (Studi tentang Perlindungan Hukum terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah), (Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009).

Setiono, “*Rule of law (Supremasi Hukum)*”, Tesis Magister Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004).

Sorongon, V.V., Saerang, D.P.E & Alexander,S, *Analisis Proses Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Pada Kantor Wilayah Djp Suluttenggo Malut*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 16, No 1, 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pedata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN Nomor 85 Tahun 2007 , TLN Nomor 4740.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, LN Nomor 131 Tahun 2004, TLN Nomor 4443.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

### **Jurnal Elektronik/Majalah/Koran**

<https://www.setneg.go.id>, “*Presiden Paparkan Kinerja Pemerintahan Jokowi\_JK*”, 10 Januari 2017.

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, “*Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*. Retrieved from APBN 2017, 7 Agustus 2017.

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>, (2017, Juli 17), “*Implementasi Undang-Undang Kepailitan dan Implikasinya Terhadap Piutang Negara*”, 17 Juli 2017.

<https://kbbi.web.id/perlindungan>.

<https://www.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/1286>, 24 April 2017.